



**RENJA**  
**( RENCANA KERJA )**  
**TAHUN 2023**



**DINAS**  
**PERHUBUNGAN**  
**KABUPATEN SUKABUMI**



## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat ALLAH SWT, yang telah memberi rahmat dan karunia-Nya atas terselesaikannya Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi tahun 2023. Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 dengan berpedoman kepada Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2023.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) merupakan Dokumen perencanaan Dinas dalam rangka mengarahkan Tujuan serta Sasaran Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggung Jawabkan sesuai dengan Kebijakan, Program dan Sasaran yang telah di tetapkan dalam Renscana Strategis Dinas. Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi pada hakikatnya merupakan komitmen bersama yang lahir dari nilai dan norma organisasi melalui proses dan pemahaman yang senantiasa meningkat dan terus menerus, dan dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan di masa depan di bidang perhubungan.

Kami menyadari dalam penyusunan Rencana Kerja ini masih banyak terdapat kekurangan didalam penyajiannya untuk itu kami mengharapkan saran serta masukan dari berbagai pihak guna kesempurnaan Rencana Kerja dimaksud untuk masa mendatang. Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi ini semoga dijadikan sebagai arah dan pedoman serta motivasi peningkatan kinerja bagi semua Pegawai di Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi di dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya masing-masing.

Sukabumi, Juli 2022

Kepala Dinas,



**BEDI CARDIMAN, S.IP., M.Si**

Pemimpin Utama Muda/IV c  
NIP.19640421 198310 1 001



---

## DAFTAR ISI

**BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 latar belakang
- 1.2 landasan hukum
- 1.3 maksud dan tujuan
- 1.4 sistematika penulisan.

**BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA**

- 1.1 evaluasi Tahun 2021 dan evaluasi berjalan Tahun 2022 sampai dengan Semester 1 meliputi pelaksanaan renja, capaian renstra
- 1.2 analisis kinerja pelayanan
- 1.3 isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi
- 1.4 review terhadap rancangan awal RKPD
- 1.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

**BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

- 1.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan Provinsi
- 1.2 Tujuan dan sasaran renja
- 1.3 Program dan kegiatan Dinas Perhubungan.

**BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

**BAB V PENUTUP**



---

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja (Renja) yang mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Renja Perangkat Daerah memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Serta terbitnya Surat Edaran Bupati Sukabumi Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( Renja ) Perangkat Daerah Tahun 2023, Tanggal 7 Juli 2022, maka disusunlah Rencana Kerja Tahun 2023.

Dokumen Renja Dinas Perhubungan Tahun 2023 mengacu pada Renstra Dinas Perhubungan periode Tahun 2021-2026. Disamping itu, Renja Dinas Perhubungan harus terintegrasi dengan prioritas dan fokus pembangunan daerah Tahun 2023, bersinergi dengan prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Barat, serta harus menjadikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Dinas Perhubungan.

Renja Dinas Perhubungan ini memuat usulan-usulan kegiatan Tahun 2023 dengan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *top down*, dan *bottom up*. Pendekatan partisipatif dilaksanakan melalui musrenbang kecamatan untuk memperoleh aspirasi masyarakat. Hasil musrenbang kecamatan yang menjadi rancangan Renja Perangkat Daerah didiskusikan dalam Pra Musrenbang yang dihadiri oleh unsur-unsur kecamatan dan masyarakat untuk mensinergikan rencana program dan kegiatan Tahun 2023.

Selanjutnya dokumen Renja Tahun 2023 dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Perhubungan dan kemudian menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran



(DPA) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukabumi.

Mengingat sumberdaya yang terbatas maka usulan-usulan dalam rancangan Renja Dinas Perhubungan memerlukan kajian lebih lanjut agar dapat ditentukan prioritas. Penentuan kegiatan prioritas dilaksanakan dengan menyaring usulan-usulan agar selaras dengan kebijakan pemerintah pusat, pemerintah provinsi Jawa Barat, dan dokumen-dokumen perencanaan. Selain itu penentuan kegiatan 2023 juga harus memperhatikan proyeksi kondisi 2022. Usulan-usulan kegiatan yang masuk dipilah ke dalam beberapa skala prioritas yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan.

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan hukum yang digunakan dalam pembuatan Rencana Kerja Dinas Perhubungan ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);



6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);



14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

22. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 486);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);



24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 No 8, Tambahan Lembaran Daerah No 237);

25. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2022);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2009 Nomor 13);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 22 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012 Nomor 22);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 4);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 7);

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Renja Dinas Perhubungan tahun 2023 ini dimaksudkan agar menjadi pedoman bagi perencanaan kegiatan dan anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi yang akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2023.

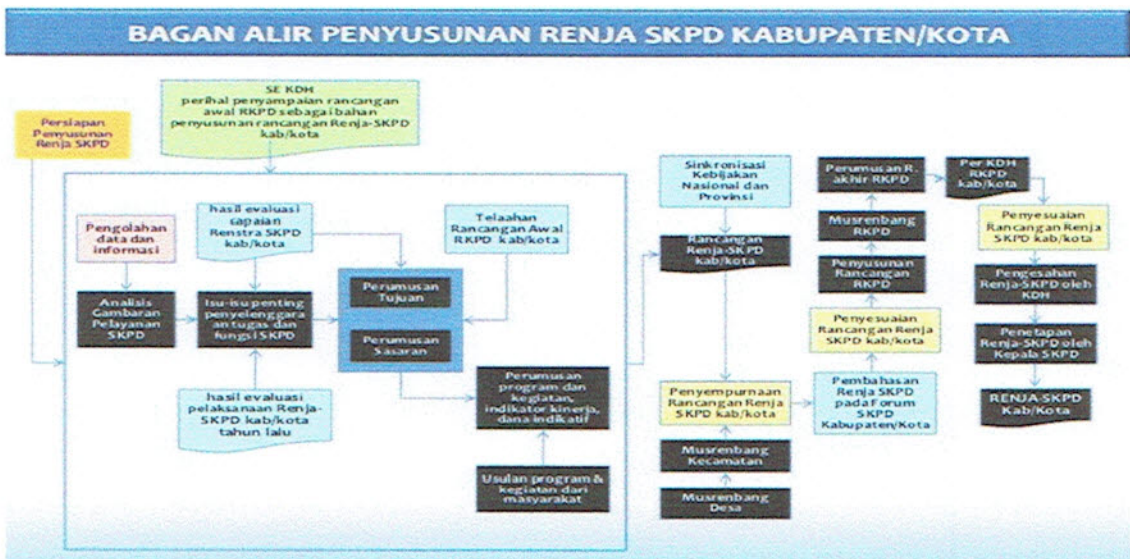
Tujuan penyusunan Renja Dinas Perhubungan adalah untuk mensinergikan fungsi perencanaan dengan program pembangunan, peningkatan kinerja dan pelayanan serta peningkatan keselamatan di bidang perhubungan.



#### 1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi dilakukan oleh Tim Penyusun Renja Dinas Perhubungan dengan melibatkan *Stakeholders* di bidang Perhubungan untuk memberikan masukan-masukan dalam penyusun Renja. Gambaran tentang Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi Tahun 2023, ditunjukkan pada gambar 1.1.

Gambar 1.1





Sedangkan sistematika penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 latar belakang
- 1.2 landasan hukum
- 1.3 maksud dan tujuan
- 1.4 sistematika penulisan.

**BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA**

- 1.6 evaluasi Tahun 2021 dan evaluasi berjalan Tahun 2022 sampai dengan Semester 1 meliputi pelaksanaan renja, capaian renstra
- 1.7 analisis kinerja pelayanan
- 1.8 isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi
- 1.9 review terhadap rancangan awal RKPD
- 1.10 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

**BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

- 1.4 Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan Provinsi
- 1.5 Tujuan dan sasaran renja
- 1.6 Program dan kegiatan Dinas Perhubungan.

**BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

**BAB V PENUTUP**



## BAB II

### EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

#### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perhubungan

Sebagaimana telah diulas pada Bab I bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi baru terbentuk tahun 2016 dimana sebelumnya adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dengan dasar pembentukan yaitu Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 68 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Tahun lalu (Tahun 2021) dan prakiraan capaian berjalan (Tahun 2022), mengacu pada APBD Tahun berjalan yang pada waktu penyusunan Renja Perubahan Dinas Perhubungan sudah disahkan.

Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Perhubungan berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Tahun-Tahun sebelumnya, disajikan dalam tabel 2.1. terlampir.

Tabel 2.1  
Capaian Kinerja Tahun Anggaran 2021 terhadap target RENSTRA

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi *)	% capaian
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya Kinerja Layanan Transportasi	Persentase sarana dan prasarana transportasi (darat dan perairan)	%	53	52,30	98,68
	Persentase peningkatan keselamatan transportasi	%	38	45,66	120,2
	Persentase menurunnya tingkat kemacetan lalu lintas di jalan	%	38,65	38,65	100



Ada Dua program yang menjadi program khusus dan prioritas Dinas perhubungan yaitu :

- 1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ( LLAJ )Program**
- 2. Program Pengelolaan Pelayaran**

**1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ( LLAJ )**

Adapun Pencapaian dari program ini dapat dilihat dari table berikut ini :

Sasaran Strategis	Program/Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
<b>Meningkatnya kinerja layanan transportasi</b>	<b>Program penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ( LLAJ )</b>				
	Indikator nya : Presentase Peningkatan Keselamatan transportasi	%	38	45,66	120,2
	Indikator nya : Presentase Menurunnya tingkat kemacetan lalulintas di jalan	%	38,65	38,65	100

Tabel di atas dapat di jelaskan Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ( LLAJ ) dapat di capai dengan capaian kinerja Kurang Baik, seluruh target indikator kinerja Program dapat di capai seluruhnya dengan capaian **120,2** %, hal ini dilihat dari kenaikan angka kecelakaan lalulintas yang terjadi di Kabupaten Sukabumi selama tahun 2021. berdasarkan data dari Kepolisian Resort Kabupaten Sukabumi pada tahun 2021 terdapat 143 kecelakaan lalulintas, sedangkan tahun lalu hanya terdapat 119 kecelakaan lalulintas, hal ini menyebabkan penurunan tingkat keselamatan lalulintas sebesar **20,17** %. Kecelakaan lalulintas ini disebabkan oleh berbagai macam antara lain kesalahan pengendara nya sendiri atau human error, Jalan yang kurang bagus dan lain sebagainya. Sedangkan yang dibabkan oleh kurangnya sarana prasana lalulintas yang merupakan salah satu tugas pokok fungsi dari Dinas Perhubungan sangatlah sedikit, karena sebaaign besar terjadi karena human error atau kesalahan si pengendara itu sendiri antara lain kurang sabar sehingga ngebut-ngebutan, kurang mengerti tata tertib lalulintas dan lain sebagainya.

Kegiatan dalam pencapaian kinerja Dinas pada Program ini meliputi kegiatan di bidang peningkatan kinerja dan pelayanan Perhubungan. Kegiatan ini sangat menunjang keberhasilan Dinas dalam rangka fungsi pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Sukabumi khususnya masyarakat pengguna jalan. Kegiatan yang dominan dalam program ini adalah kegiatan dalam rangka penurunan tingkat kemacetan dan pelanggaran lalu lintas seperti Operasi angkutan lebaran, natal dan tahun baru, pengendalian lalulintas melalui CCTV, Pengaturan lalu lintas daerah rawan macet, pengawasan dan pengendalian Kawasan Tertib Lalu Lintas (KTL), Forum LLAJ, peningkatan keselamatan lalu lintas, pengawasan dampak lalu lintas /ANDALALIN.

Untuk Indikator yang kedua , yaitu Presentase menurunnya tingkat kemacetan lalulintas di Jalan, karena tugas pokok fungsi Dinas perhubungan



sebagaimana tercantum dalam Permendagri no 70 Tahun 2019 tentang SIPD dan Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020 yang membatasi kewenangan Dinas perhubungan hanya di Jaklan kabupaten maka di jalan kabupaten relatif tidak terjadi kemacetan. Kecepatan rata-rata di jalan Kabupaten adalah **46 KM/Jam** dan relatif konsisten dapat dicapai 100 %. Jadi target **38,65 %** tercapai **38,65%** atau 100 %

Isu Strategis dari program ini adalah keselamatan perhubungan terutama keselamatan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Sukabumi masih rendah sehingga program ini di tetapkan di laksanakan dalam rangka meningkatkan keselamatan transportasi di Kabupaten Sukabumi. Kondisi Operasional Terminal tidak optimal karena kondisi kapasitas dan fasilitas terminal yang semakin menurun;

Penataan parkir belum optimal sehingga mengganggu kapasitas jalan dan kelancaran arus lalu lintas.

Kegiatan lainnya dalam program ini yang di laksanakan dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan angkutan umum meliputi pembinaan angkutan umum, identifikasi dan monitoring operasional angkutan penumpang orang dan barang.

**Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ( LLAJ )** ini dilaksanakan melalui **10 ( Sepuluh )** kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. **16.684.656.006,-** terealisasi sebesar Rp. **16.474.420.525,-** atau dengan serapan anggaran sebesar 98,74 %. Rincian kegiatannya adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten /Kota, Pagu anggaran Rp.13.541.329.600, sumberdana APBD Kabupaten, bentuk kegiatan: Sosialisasi, realisasi anggaran Rp. 13.541329.600,- atau 100 %.  
--Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota, Anggaran Rp. 11.127.552.300, Realisasi Rp. 11.127.552.300., Atau 100%.  
Output : Terbangunya Sarana Jalan di Jalan kabupaten/Kota.  
--Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan, Anggaran Rp. 2.413.777.300. Realisasi Rp. 2.413.777.300., Atau 100%. Output : Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan.
2. Kegiatan Pengelola Terminal Penunjang Tipe C, Pagu anggaran Rp. 1.550.684.326, realisasi anggaran Rp. 1.402.946.150,- atau 90,47%.  
--Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Type C, Anggaran Rp. 443.931.400, Realisasi Rp. . 443.931.400., Atau 100%.  
Output : Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Type C yang tersusun.  
--Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal, Anggaran Rp. 491.890.526, Realisasi Rp. 491.888.050., Atau 99,99%. Output : Berkembangnya Sarana dan Prasarana Kantor.  
--Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung), Anggaran Rp. 614.862.400., Realisasi Rp. 467.126.700., Atau 75,97% . Output : Terlaksananya Rehab dan Pemeliharaan Terminal.
3. Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, pagu anggaran Rp. 753.429.380,- realisasi anggaran Rp. 739.194.500,- atau 98.11 %.  
--Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, Anggaran Rp. 358.991.780., Realisasi Rp. 354.618.500., Atau 98,78%. Output Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.  
--Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, Anggaran Rp. 275.000.000., Realisasi Rp. 275.000.000., Atau 100%. Output :Tersedianya Buku Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.  
-- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, Anggaran Rp. 119.437.600., Realisasi Rp. 109.576.000.,



- Atau 91,74%. Output : Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.
4. Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota, pagu anggaran Rp. 570.274.700,- sumber dana APBD Kabupaten, bentuk kegiatan pengendalian Lalulintas dan angkutan hari besar dan hari libur,, realisasi anggaran Rp. 526.141.775,- atau 92.26 %.
    - Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, Anggaran Rp. 197.987.900., Realisasi Rp. 197.987.900., Atau 100%. Output : Tersedianya Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di setiap UPTD
    - Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten/Kota, Anggaran Rp. 301.759.500., Realisasi Rp. 270.227.600., Atau 89,55%. Output : Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten/Kota.
    - Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten /Kota, Anggaran Rp. 70.527.300., Realisasi Rp. 58.272.275., Atau 82,62%. Output : Terpeliharanya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten /Kota
  5. Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas ( Andalalin ) Untuk Jalan Kabupaten/Kota, Pagu anggaran RP. 43.971.000,- realisasi anggaran Rp. 43.771.000, atau 99,54%
    - Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin, Anggaran Rp. 43.971.000., Realisasi Rp. 43.971.000., Atau 100%. Output : Terlaksananya pengawasan rekomendasi Andalalin.
  6. Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di jalan, Pagu anggaran Rp. 77.127.000,- realisasi anggaran Rp. 73.197.500,- atau 94,90%.
    - Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kopentensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota, Anggaran Rp. 77.127.000., Realisasi Rp. 73.197.500., Atau 94,90%. Output : Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kopentensi Pengemudi Kendaraan Bermotor.
  7. Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 ( Satu ) Daerah Kabupaten/Kota, pagu anggaran Rp.23.667.000,- realisasi anggaran Rp. 23.667.000,- atau 100 %. Output : Tersedianya Angkutan Umum untuk jasa angkutan orang
    - Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 ( Satu ) Daerah Kabupaten/Kota, Anggaran Rp. .23.667.000., Realisasi Rp. .23.667.000., Atau 100%. Output :
  8. Kegiatan Penetapan Kawasan Perkotaan Untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 ( satu ) Daerah Kabupaten/Kota, pagu anggaran Rp. 42.505.000,- realisasi anggaran Rp. 42.505.000,- atau 100 %.
    - Sosialisasi dan Uji coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota, Anggaran Rp. 42.505.000., Realisasi Rp. 42.505.000., Atau 100%. Output : Terlaksananya Sosialisasi di 7 UPTD Dinas Perhubungan
  9. Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 ( satu ) daerah Kabupaten/Kota, pagu anggaran Rp. 32.068.000,- realisasi anggaran Rp. 32.068.000,- atau 100 %.



- Sosialisasi dan Uji coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota, Anggaran Rp. 32.068.000., Realisasi Rp. 32.068.000., Atau 100%.  
Output : Terlaksananya sosialisasi di 7 UPTD Dinas Perhubungan
10. Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 ( satu ) Daerah Kabupaten/Kota, pagu anggaran Rp. 49.600.000,- sumber dana APBD Kabupaten, realisasi anggaran Rp. 49.600.000,- atau 100 %.
- Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, Anggaran Rp. 49.600.000., Realisasi Rp. 49.600.000., Atau 100%. Output : Mempasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin.

## 2. Program Pengelolaan Pelayaran

Adapun pencapaian programnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Sasaran Strategis	Program/Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
<b>Meningkatnya kinerja layanan transportasi</b>	<b>Program Pengelolaan Pelayaran</b>				
	Indikator nya: Persentase Sarana dan Prasarana Transportasi (darat dan perairan)	%	53,00	52,30	98,68

Tabel di atas dapat di jelaskan Program Pengelolaan Pelayaran dapat di capai dengan capaian kinerja Baik, target indikator kinerja Program dapat di capai dengan capaian **98,68%** . Kegiatan dalam pencapaian kinerja Dinas pada Program ini meliputi kegiatan di bidang pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan prasarana/infrastruktur dan fasilitas Perhubungan. Kegiatan ini sangat menunjang keberhasilan di bidang infrastruktur perhubungan di Kabupaten Sukabumi. Kegiatannya meliputi kegiatan pembangunan pelabuhan dan dermaga, peralatan navigasi keselamatan pelayaran,. Kegiatan-kegiatan dalam mendukung pencapaian target sasaran indikator kinerja pada program ini membutuhkan anggaran yang besar sehingga seringkali terjadi backlog anggarannya, akan tetapi setiap tahun di lakukan penganggaran secara bertahap seperti pembangunan Terminal dan Pelabuhan Perairan.

Isu Strategis program ini :

1. Simpul jaringan transportasi meliputi terminal angkutan orang dan barang dan pelabuhan perairan belum memenuhi kebutuhan pelayanan transportasi secara keseluruhan di bidang perhubungan
2. Perlengkapan jalan dan peralatan navigasi dan keselamatan pelayaran belum memenuhi seluruh kebutuhan dalam jaringan jalan di Kabupaten Sukabumi
3. Keterbatasan Sarana operasional pelayanan perhubungan dan rencana pengembangan angkutan massal belum memenuhi kebutuhan sarana transportasi masyarakat Kabupaten Sukabumi yang handal dan nyaman.

Latar belakang program ini :

1. Masih rendahnya kuantitas dan kualitas pelayanan penyelenggaraan Perhubungan Darat, Laut, Sungai dan Penyeberangan, meliputi terdapatnya terminal dan pelabuhan yang refresentatif.
2. Masih terbatasnya perlengkapan jalan dan peralatan navigasi keselamatan pelayaran;;



3. Terbatasnya anggaran untuk pelaksanaan program, sehingga terdapat backlog anggaran untuk infrastruktur transportasi yang membutuhkan dana besar.

Tujuan program ini :

Program ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan ketersediaan sarana, prasarana dan fasilitas perhubungan yang berkualitas dalam rangka meningkatkan pelayanan transportasi pelayaran yang selamat dan handal di Kabupaten Sukabumi.

Sasaran program ini :

- a. Terlaksananya pembangunan infrastruktur perhubungan berupa simpul Jaringan transportasi berbasis Jalan dan berbasis perairan;
- b. Meningkatnya operasional pelayanan terminal dan pelabuhan sebagai simpul jaringan transportasi di Kabupaten Sukabumi;
- c. Terpenuhinya perlengkapan jalan dan peralatan navigasi keselamatan pelayaran dalam rangka menunjang kinerja pelayanan perhubungan;
- d. Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana operasional pelayanan perhubungan dan Terlaksananya program pengembangan angkutan umum massal;

Rasional Program ini :

Penyusunan rewiu masterplan Penataan Transportasi di Kabupaten Sukabumi sebagai pedoman dalam rangka penataan ulang, efisiensi, efektivitas, integrasi, keterpaduan dan berkelanjutan di bidang pengembangan sarana dan prasarana perhubungan serta perlengkapan jalan dan peralatan navigasi keselamatan pelayaran.

Untuk Simpul jaringan transportasi berbasis perairan sudah mulai menunjukkan kinerjanya dan pada akhir tahun ini sedang di laksanakan pembangunan dermaga pelabuhan regional palabuhanratu, telah di lakukan penyusunan Kajian Pelabuhan Pengumpan Lokal- Palangpang (Dinas Perhubungan Propinsi) serta sudah memiliki dokumen Tatanan Kepelabuhanan di wilayah perairan Kabupaten Sukabumi. Selain itu disepanjang sungai Cikaso ada 3 Dermaga yang sudah beroperasi, tetapi baru satu dermaga yang sudah dibangun, yaitu dermaga apung Ciniti. Sedangkan untuk dua dermaga yaitu dermaga Buni asih dan Ciloma baru sampai tahap perencanaan. Tahun 2021 telah dilaksanakan Kegiatan Kajian Kerangka Acuan Amdal Lingkungan Pelabuhan Pengumpan Lokal Cibangban dan Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Sungai dan danau ( Pembangunan Talud Dermaga Apung Cikaso ). Ada beberapa kegiatan pembangunan infrastruktur perairan yang seharusnya sudah terbangun, namun karena keterbatasan anggaran di tahun 2021, mengakibatkan kegiatan pembangunan insfrastruktur tersebut tidak dapat terlaksana , antara lain :

1. Pembangunan Pandusuar Buni Asih Kecamatan Tegalbuleud, pandusuar Ciloma kecamatan Cibitung dan Pandusuar Minajaya
2. Pemeliharaan 15 Pandusuar yang sudah terbangun, belum terlaksana karena keterbatasan anggaran
3. Pembangunan Talud yang seharusnya 600 M<sup>2</sup> baru terbangun 50 M<sup>2</sup>

**Program Pengelolaan Pelayaran** ini dilaksanakan melalui **2 ( dua )** kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. **531.854.250,-** Realisasi anggaran sebesar Rp. **531.854.250,-** atau Serapan anggaran sebesar 100 %. Rincian kegiatan yang ada di program ini adalah:

1. Kegiatan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoprasian Pelabuhan Pengumpan Lokal, Pagu anggaran sebesar Rp. 334.499.200,- sumber dana APBD Kabupaten, realisasi anggaran Rp.



334.499.200,- atau 100 %.

--Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal, Anggaran Rp. 279.832.700., Realisasi Rp. 279.832.700., Serapan Anggaran 100%, Output : Terbangunnya Pelabuhan pengumpan Lokal Kec ciemas dan Kec cisolok.

--Pengawasan Pengoprasian Pelabuhan Pengumpan Lokal, Anggaran Rp. 54.666.600., Realisasi Rp. 54.666.600. Serapan Anggaran 100%, Output : Melaksanakan Pengawasan pengoprasional Pelabuhan.

2. Kegiatan Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoprasian Pelabuhan Sungai dan Danau, Pagu anggaran Rp. 197.355.050,- realisasi anggaran Rp. 197.355.050,- atau 100%.

--Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau, Anggaran Rp. 197.355.050, Realisasi Rp. 197.355.050, Atau 100%. Output : Berjalannya Oprasional Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau Kec Cibitung dan Tegal buled.

### C. Inovasi

Uji KIR berbasis elektronik **BLUe** (Bukti Lulus Uji elektronik) menggantikan bukti lulus uji KIR yang dulunya berbentuk buku. BLUe terdiri dari dua sertifikat tanda lulus uji, dua stiker hologram dengan QR Code yang ditempel pada kaca depan kendaraan dan satu Smart Card dengan teknologi NFC (near file communication).

Data seperti identitas kendaraan, foto fisik kendaraan dari empat sisi, hingga data hasil pengujian berkala disimpan dalam format digital. Data-data tersebut dapat diakses dengan memindai QR Code pada stiker hologram. Bisa juga dengan menempelkan smart card ke smartphone yang sudah memiliki fitur NFC.

Digitalisasi data hasil uji KIR ini diharapkan dapat meminimalisir praktik pemalsuan identitas kendaraan maupun hasil uji berkala yang kerap dilakukan pada kendaraan angkut. Untuk itu, jika terjadi perubahan bentuk pada bak angkut maka pelayanan akan dikesampingkan dan mengedepankan yang lainnya. Tujuannya agar permasalahan yang dialami satu kendaraan tidak menghambat pelayanan pada kendaraan lainnya.

Pada system BLUe, sopir akan mendapatkan smart card. Fungsinya merekam secara digital hasil uji kendaraan. Bentuknya menyerupai KTP dimana didalamnya terinput data identitas pemilik kendaraan, identitas kendaraan, dan foto 4 sisi kendaraan yaitu dari depan, belakang, kiri, dan kanan.

Disamping smart card, sopir juga diberi hologram untuk ditempel pada mobil sebagai bukti lulus uji, dan Sertifikat bukti lulus uji sebagai dokumen bagi supir.

Selain itu ada aplikasi **SIPRAHUDARAT ( Sistem Informasi Perhubungan Darat )** yaitu aplikasi yang mengatur data-data prasarana perhubungan darat, perlengkapan jalan, transportasi dan parkir. SIPRAHUDARAT adalah system yang dikembangkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi, Dimana dalam system ini kita dapat mengetahui jumlah prasarana, keterangan prasarana juga titik sabar prasarana di seluruh Kabupaten Sukabumi. Sistem ini di buat sebagai akses control masyarakat dalam pemeliharaan serta peningkatan prasarana yang di kelola oleh Dinas Perhubungan Darat serta sebagai inventarisasi aset yang di miliki oleh dinas perhubungan .

### D. Rekomendasi

Jawaban rekomendasi DPRD Kabupaten Sukabumi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)

1. Belum optimalnya terkait dengan penataan Terminal yang ada di Kabupaten Sukabumi salah satunya terminal Cibadak, Terminal Jubleg dan Terminal Benda, mendorong kepada Dinas Perhubungan agar terus



melakukan evaluasi dan segera mengoptimalkan Terminal yang ada yang nantinya akan menjadi Sumber PAD;

Jawaban Rekomendasi :

- Kami dari Dinas Perhubungan sudah berusaha untuk mengoptimalkan Fungsi dan Kinerja Baik fasilitas, sarana prasarana maupun personil Terminal agar meningkatkan pendapatan PAD yang ada terminal Cibadak, terminal Jubleug dan terminal benda.

Hal dari belum optimalnya tentang penyelenggaraan operasional terminal dari temuan –temuan di lapangan diantaranya :

1. Banyaknya pengemudi/supir tidak mau menarik atau menurunkan penumpang di area terminal, lebih cenderung menaik penumpang di luar terminal,
2. Kurang strategisnya letak/posisi terminal karena tidak terletak di pusat keramaian,
3. Banyaknya pengemudi/sopir cenderung menaik/menurunkan di luar terminal karena rute/ jalan yang dilalui adalah pasar dan pemukiman masyarakat,
4. Banyaknya angkutan online yang menjemput penumpang dari rumah ke tujuan sehingga fungsi terminal semakin berkurang.

Langkah untuk mengoptimalkan Terminal :

1. Terminal harus dapat menjamin ketepatan arus angkutan baik penumpang maupun barang,
2. Lokasi terminal hendaknya sesuai dengan rencana tata ruang pengembangan kota,
3. Lokasi terminal hendaknya dapat menjamin penggunaan dan operasi kegiatan terminal yang efisien dan efektif.

Melakukan evaluasi tarikan bangkitan angkutan yang relevan sesuai trayek

4. Terminal Cibadak sudah direncanakan membuat FS pada tahun 2023
5. Pengajuan Kajian RDTR tentang relokasi terminal Cibadak ke daerah Sunda wenang
6. Reviu Trayek untuk terminal Benda sudah diajukan ke Dinas Perhubungan Provinsi.

2. Masih minimnya Penerangan Jalan Umum, sesuai dengan Rekomendasi pada LKPJ Tahun 2019 ini masih menjadi permasalahan, Komisi I berharap agar Dinas Perhubungan melakukan evaluasi dan langsung terjun kelapangan untuk menyelesaikan masalah penerangan Jalan Umum yang ada di kabupaten Sukabumi;

Jawaban Rekomendasi :

Masih minimnya penerangan jalan umum di Wilayah Kabupaten Sukabumi dikarenakan anggaran yang diberikan oleh Tim TAPD Kabupaten Sukabumi kepada Dinas Perhubungan lebih kecil dari usulan yang diajukan. Selain itu, refocusing anggaran juga menjadi penyebabnya.

- Dinas Perhubungan sudah berusaha mengusulkan kembali penambahan anggaran baik dalam anggaran perubahan maupun bantuan keuangan provinsi. Namun anggaran yang diberikan tidak sesuai dengan usulan

3. Belum terselesaikan masalah Kemacetan yang ada di Kabupaten Sukabumi salah satunya Wilayah Kecamatan Cicurug dan Cibadak sesuai dengan Rekomendasi pada LKPJ Tahun 2019, berharap agar Dinas Perhubungan terus meningkatkan koordinasi dengan Dinas /Instansi Lainnya dan menyusun rencana aksi untuk menyelesaikan permasalahan kemacetan yang ada di Wilayah Kecamatan Cibadak dan Cicurug;

Jawaban rekomendasi :



- Upaya yang dilakukan untuk mengurangi kemacetan dan penertiban lalu lintas yaitu dengan cara personil bidang lalu lintas yang ditugaskan sebagai mengatur lalu lintas untuk lebih meningkatkan kembali kinerja dilapangan dan lebih tegas menindak para pengguna jalan yang melanggar lalu lintas.
- Mengoptimalkan kembali pengawasan pelaksanaan PERDA no 17 tahun 2013 Tentang Pengawasan pengendalian lalu lintas dan angkutan jalan di kabupaten Sukabumi terutama jam oprasional angkutan barang.
- Melaksanakan pembinaan ke perusahaan yang menimbulkan kemacetan untuk memfungsikan celukan yang sudah ada sehingga kendaraan yang menunggu karyawan pulang tidak berada di bahu jalan.
- Tingginya hambatan samping, seperti PKL yang berjualan di badan jalan di kota cibadak menjadi penyebab kemacetan.
- Tingginya exsisting kapasitas jalan tidak sebanding dengan volume kendaraan, terlebih dengan pesatnya pertumbuhan industry di kabupaten sukabumi sehingga bertambahnya bangkitan lalu lintas.
- Upaya lain untuk penanganan kemacetan khususnya di Cibadak-Parungkuda dan Cicurug, Dishub dan Polres Sukabumi sudah melakukan koordinasi akan dibuatkan regulasi di mana pada hari sabtu dan minggu kendaran angkutan barang beroperasi pada malam hari dan akan di bahas pada forum lalu lintas.

#### **E. Permasalahan/Kendala**

Di Kabupaten Sukabumi jaringan jalan masih merupakan prasarana transportasi yang dominan dengan moda angkutan jalan sebagai alat transportasi utama. Di lain pihak jaringan jalan yang ada saat ini belum dapat melayani dan mendukung hubungan antar wilayah, hal ini disebabkan fungsi jaringan jalan yang belum maksimal, seperti belum adanya lintas-lintas alternatif yang memadai, belum lengkapnya sistem jaringan jalan yang ada antara lain ditandai dengan tidak jelasnya peran dan fungsi jalan, belum lengkapnya hirarki jalan serta berbaurnya lalu lintas cepat dan lambat, lalu lintas jarak jauh dan lalu lintas lokal.

Sasaran umum Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertujuan menciptakan sistem pelayanan angkutan jalan di wilayah Kab. sukabumi yang terpadu dan mampu mengakomodasi mobilitas orang dan barang dengan lancar serta menunjang pertumbuhan ekonomi dan aktifitas masyarakat. Strateginya adalah dengan mengembangkan dan melaksanakan langkah – langkah perbaikan dan pengaturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara optimal. Permasalahan transportasi di kawasan perkotaan dapat berupa gangguan keselamatan dan kelancaran atau kemacetan lalu lintas, saat ini sudah sangat mengganggu aktivitas penduduk, kemacetan lalu lintas tersebut banyak menimbulkan dampak negatif terhadap pengguna jalan dan daerah sekitar jalan, baik ditinjau dari aspek ekonomi dan lingkungan. Sebagai contoh, kemacetan lalu lintas akan berakibat meningkatnya biaya operasi kendaraan, kehilangan waktu, penurunan kenyamanan pengguna jalan dan penurunan kualitas udara serta peningkatan kebisingan di daerah sepanjang jalan.

Masalah lain tak kalah pentingnya ialah tingkat pelayanan angkutan umum. Angkutan umum, yang saat ini didominasi angkutan bus dan Angkot masih terasa kurang nyaman, kurang aman dan kurang efisien. Angkutan massal (mass rapid transit) seperti kereta api masih kurang berfungsi untuk angkutan umum. Pemakai jasa angkutan umum masih terbatas pada kalangan bawah dan sebagian kalangan menengah. Orang-orang berdasar masih cnggan memakai angkutan umum, karena



comfortability angkutan umum masih mereka anggap terlalu rendah, dibandingkan dengan kendaraan pribadi yang begitu nyaman dengan pelayanan dari pintu ke pintu. Sampai saat ini baru golongan masyarakat tingkat menengah ke bawah menggunakan jasa angkutan umum. Angkutan umum masih kurang menarik, karena masih terdapat kekurangan-kekurangannya, terutama dari segi kenyamanan, keamanan, kecepatan, ketepatan, kemudahan, frekuensi dan jadwal keberangkatan dan fasilitas di terminal dan halte.

Kabupaten Sukabumi memiliki wilayah yang cukup luas dan jumlah penduduk terbesar serta dengan kondisi geografis yang banyak gunung, lembah dan juga masih banyak daerah terpencil dan terisolir. Daerah terisolir di Jawa Barat ada yang dipisahkan oleh Danau atau Sungai. Daerah-daerah yang terisolir tersebut perlu juga mendapat layanan jasa transportasi untuk masyarakat yang membutuhkan. Salah satu layanan jasa transportasi tersebut adalah Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP). Layanan transportasi ASDP memerlukan dermaga/pelabuhan sebagai simpul untuk naik dan turun penumpang/barang. Mengingat kondisi tersebut, perlu ketersediaan dermaga Barat untuk melayani masyarakat terhadap layanan transportasi ASDP. Dengan prasarana ASDP antara lain dermaga atau landing area diharapkan Lalu Lintas Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (LLASDP) dapat beroperasi dengan lancar terpadu, aman dan nyaman sehingga mampu meningkatkan efisiensi pergerakan orang dan barang.

Masalah anggaran yang realtif kurang merupakan masalah yang terbesar yang dihadapi dishub untuk saat ini, karena banyak target kegiatan pembangunan infrastruktur yang direncanakan akan dibangun, seperti pembangunan sarana prasana di bidang perairan, terminal, perlengkapan jalan tidak dapat terealisasi .

Kurangnya SDM dibidang perhubungan laut, PPNS, Pejabat Pengadaan barang dan jasa, juga menjadi masalah tersendiri.

#### **F. Solusi/Tindak lanjut**

Dalam rangka meningkatkan pelayanan jasa angkutan khususnya pelayanan angkutan orang di wilayah Kab. Sukabumi, telah dilakukan berbagai upaya perbaikan dan penataan baik dari segi kualitas maupun kuantitas pelayanan angkutan orang dengan kendaraan umum. Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan umum dalam trayek tetap merupakan salah satu sarana yang paling dominan dalam menunjang aktifitas dan pergerakan orang antar wilayah di Kab. Sukabumi, untuk itu sudah sepantasnya apabila kinerja pelayanan angkutan umum dapat dikembangkan agar tercipta suatu sistem pelayanan angkutan orang yang lebih baik. Sebagai implikasi dari perkembangan wilayah, pertumbuhan penduduk dan meningkatnya jumlah kepemilikan kendaraan bermotor, teridentifikasi terjadinya ketidakseimbangan antara supply dan demand angkutan penumpang umum di Kab. Sukabumi. Untuk menjamin ketersediaan pelayanan penumpang angkutan umum di Kab. sukabumi, Dinas Perhubungan Kab. sukabumi pada Tahun Anggaran 2021 telah melaksanakan kegiatan Penataan Jaringan Trayek.

Saat ini Dinas Perhubungan Kab. Sukabumi terus memperbaiki sistem penataan transportasi untuk meningkatkan kebutuhan masyarakat. Transportasi sendiri merupakan faktor utama yang menjadi sarana penghubung untuk mendukung berkembangnya kemajuan ekonomi, sosial dan demokrasi melalui penghargaan Wahana Tata Nugra (WTN) yang akan dikuti tahun mendatang

Adapun target yang akan Dinas Perhubungan lakukan :



- 1) Mewujudkan sumber daya manusia perhubungan yang berkualitas.
- 2) Mengembangkan pelayanan transportasi Laut dan ASDP yang handal.
- 3) Mengembangkan pelayanan transportasi darat yang efisien.
- 4) Meningkatkan jangkauan pelayanan transportasi yang terintegrasi.
- 5) Mengembangkan sistem pengawasan dan pengendalian transportasi yang akuntabel.

Untuk mengembangkan kualitas Sumber Daya Manusia di bidang Perhubungan, perlu adanya Bimbingan Teknologi

#### G. Prestasi/Penghargaan

Pada tahun 2021, karena masih dalam era Pandemi Covid 19, maka tidak event – even perlombaan yang diselenggarakan atau diikuti oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi.

#### I. Pendapatan Asli Daerah (PAD):

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Perhubungan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021 dapat kami uraikan sebagai berikut :  
Tabel 1 : Target dan Realisasi PAD Perhubungan Tahun 2021

N O	URAIAN AYAT/PASAL PENERIMAAN	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5
	<b>4.1</b>			
	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>1,745,000,000</b>	<b>1.739.805.550</b>	<b>99.70</b>
<b>I</b>	<b>4.1.2</b>			
	<b>Retribusi Daerah</b>	<b>1,650,000,000</b>	<b>1.637.156.250</b>	<b>99.22</b>
I.I	4.1.2.04.01			
	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	40,000,000	25,936,000	64.84
I.2	4.1.2.06.01			
	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1,210,000,000	1.408.223.250	116,38
I.3	4.1.2.17.03			
	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	400,000,000	202,997,000	50.75
<b>II</b>	<b>4.1.4</b>			
	<b>Lain - lain PAD yang sah</b>	<b>95,000,000</b>	<b>102,649,300</b>	<b>108.1</b>
II.1	4.1.4.14.01			
	Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD	20,000,000	10,500,000	52.50
II.2	4.1.4.47.06			
	Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	60,000,000	92,149,300	153,58
	4.1.4.64.01			
II.3	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	15,000,000	-	0.00



Selanjutnya di sampaikan penyebab ketidak tercapaian beberapa target PAD di sebabkan sebagai berikut :

- a. Penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) disebabkan oleh hilangnya beberapa potensi seperti potensi terminal, potensi parkir, dan sewa kemitraan (MCK) yang tidak diperpanjang
- b. Potensi Parkir yang dapat dipungut hanya tinggal 3 beberapa titik, Wilayah Pangleseran, Jubleug, Sukaraja, Cinagen, Bojong haur, Cikembang, Cisaat dan Cicurug sudah tidak diadakan pungutan lagi, salah satu alasannya adalah karena adanya pasar modern di wilayah tersebut sehingga lahan parkir yang semula di depan pasar dikelola oleh Dinas Perhubungan sekarang dikelola oleh OPD lain.
- c. Peralihan Kepemilikan angkutan umum berbadan hukum sesuai dengan Perbup Nomor 551/Kep.686-Dishubkominfo/2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Umum Berbadan Hukum mulai berlaku Tanggal 1 Januari 2017 sebagai tindaklanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan menjadi kendala yang di hadapi. Berdasarkan peraturan tersebut, pelayanan penerbitan Izin Trayek sedikit mengalami kendala, karena pelayanan hanya di laksanakan pada angkutan umum yang sudah berbadan hukum. Jumlah kendaraan angkutan umum yang berbadan hukum sampai dengan Bulan Juni baru 10 % dari jumlah potensi kendaraan angkutan penumpang umum.
- d. Untuk terminal dan parkir terjadi kendala operasional di lapangan, kedepannya kami akan melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi perolehan retribusi terminal dan parkir melalui pembinaan, monev dan penerapan SOP dan tahun 2021 kami melaksanakan Perda Retribusi Parkir terbaru yang sedang proses pengesahan dan selanjutnya Perda Retribusi lainnya akan di revisi secara bertahap.
- e. Pada tahun 2020, Sesuai Surat Keputusan Pengelola Barang Daerah Nomor 030/5623 – BPKAD tentang Penetapan Kembali pengguna barang milik Daerah berupa asset tetap pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi menetapkan Tanah bangunan terminal Darat yaitu Terminal Cibadak dihapuskan atau dimutasikan asetnya dari Dinas Perhubungan menjadi asset Dinas Perindustrian dan usaha Kecil Menengah (DPUKM) sehingga kegiatan operasional terminal Cibadak di hentikan untuk sementara waktu sampai adanya penetapan lokasi yang baru untuk terminal Cibadak.
- f. Pengujian Kendaraan Uji KIR Keliling tidak lagi dilaksanakan sehingga para wajib uji yang jauh di wilayah yang asalnya bisa dijangkau dengan kir keliling di beberapa wilayah yang lumayan jauh lokasinya dari kantor Dinas Perhubungan kini tidak melaksanakan uji KIR karena mahalnya ongkos jalan. Untuk datang ke kantor Dinas Perhubungan.



## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Perhubungan memiliki 1 sekretariat, 3 bidang, dan 7 UPTD Wilayah yang meliputi wilayah : Sukaraja, Cibadak, Cicurug, Sagaranten, Surade, Jampang Tengah dan Palabuhanratu. Adapun secara kuantitas, Dinas Perhubungan juga didukung oleh personil yang cukup banyak, namun untuk kualitas masih kurang.

Hasil analisis kinerja pelayanan Dinas disajikan dalam tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan.

Tabel 2.2.  
**Analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Tahun 2019-2021**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan / Formulasi	TARGET			Target Akhir RPJMD	Sumber Data
					2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Kinerja Layanan Transportasi	Persentase sarana dan prasarana transportasi (darat dan perairan)	%	$A = \left( \frac{B1}{T1} + \frac{B2}{T2} + \frac{B3}{T3} + \frac{B4}{T4} + \frac{B5}{T5} \right)$	47	50	53	53	DISHUB
				X 100 %					
				A = Tingkat Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana B1=Pencerangan Jalan Umum B2=Terminal B3=Perlengkapan Jalan B4=Dermaga B5=Pandu Suar T=Total Kebutuhan Sarana Prasarana					
		Persentase peningkatan keselamatan transportasi	%	Angka Kecelakaan tahun eksisting dikurangi Angka kecelakaan tahun sebelumnya dibagi Angka Kecelakaan tahun sebelumnya dikali 100 %	35	36	38	38	
		Persentase menurunnya tingkat kemacetan lalu lintas di jalan	%	Kecepatan rata-rata tahun eksisting dikurangi Kecepatan rata-rata tahun sebelumnya dibagi Kecepatan rata-rata tahun sebelumnya dikali 100 %	33	34	35	35	



### **2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah, kajian hasil evaluasi pelaksanaan Perangkat Daerah, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra Perangkat Daerah, maka dirumuskan isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas permasalahan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Perangkat Daerah.

2.3.1. Permasalahan dan hambatan yang menjadi isu strategis yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi dinas, antara lain:

1. Kemacetan lalu lintas dan pelanggaran angkutan barang masih menjadi isu strategis Daerah.
2. Masih rendahnya infrastruktur dan fasilitas lalu lintas dan peralatan navigasi perairan serta masih rendahnya kualitas sumber daya manusia dan keterbatasan saran mobilitas lapangan;
3. Perlunya Revisi Tatanan Transportasi Lokal serta Kajian Detil Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas pada lokasi rawan kemacetan;
4. Cakupan pelayanan perhubungan yang sangat luas, saat ini sudah di bentuk UPTD perhubungan pada 7 wilayah tetapi dukungan sumber daya terutama anggarannya sangat terbatas;
5. Perlu peningkatan penanganan permasalahan utama transportasi di Kabupaten Sukabumi meliputi kemacetan lalu lintas, pelanggaran angkutan barang, kinerja angkutan umum dan keterbatasan sumberdaya yang ada dalam penanganan masalah transportasi di Kabupaten Sukabumi;
6. Pentingnya melakukan sinkronisasi perencanaan perhubungan secara vertical dengan Dinas Perhubungan Propinsi dan Kementrian Perhubungan dalam penanganan permasalahan transportasi sehingga permasalahan transportasi dapat diselesaikan sesuai kewenangan nya.



7. Perlunya peningkatan kapasitas sumberdaya mengingat kebutuhan personil Dinas sangat banyak yang di dukung pembiayaan yang cukup;
8. Anggaran yang terbatas khususnya dalam penganggaran di bidang infrastruktur Perhubungan terutama pembangunan infrastruktur di bidang perairan seperti pelabuhan dan dermaga termasuk sarana kapal patroli.

#### **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Perangkat Daerah dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Perangkat Daerah, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap Perangkat Daerah berdasarkan rancangan awal RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan, yang dilakukan melalui tahapan :

1. Membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan.
2. Penjelasan mengenai proses tersebut.
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya : terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Dinas Perhubungan disajikan dalam tabel. 2.3.



Tabel 2.3.  
**Reviu terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2023  
Dinas Perhubungan**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023				Su mber Dana		
		Cap aian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikati f (Rp.)			
							Keluaran Sub Kegiatan	Ver val Kelu aran Sub Kegi atan			Ha sil Kegi atan	
2												
2 1 5											76,996,000,000	
2 1 0 5 1											56,000,000,000	
2 1 0 5 1 0 1											86,200,000	
		<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>										
		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN</b>										
		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>										
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
2 1 0 2 5 1 0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1. Renstra, 2. Renja Murni, 3. Renja Perubahan	Dishub	1. Renstra, 2. Renja Murni, 3. Renja Perubahan					27,840,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum





			Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Perangkit Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dishub	1. Gaji Tunjangan ASN	1. Gaji Tunjangan ASN	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum
2	1	0	2.	0				17,477,046,620
2	5	1	02	1				
2	1	0	2.	0				168,570,000
2	5	1	05	5				
2	1	0	2.	0				150,000,000
2	5	1	05	2				
2	1	0	2.	0				18,570,000
2	5	1	05	9				
2	1	0	2.	0				1,345,919,400
2	5	1	06	6				











			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	Surade, Sagaranten, Parakansalak, Jubleg	Surade, Sagaranten, Parakansalak, Jubleg			Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum
1	0	2.	0	0					333,863,111
2	5	2	03	4					0 Unit
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2.</b>		<b>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b>				
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>5</b>						<b>3,163,279,257</b>
					Ratio Kinerja Lalu Lintas Kabupaten	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Bus Keliling (1 M), Alat Uji,Pita printer,helm,sarung tangan,kacamata,masker	80 Unit	1,640,686,757
1	0	2.	0		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Bus Keliling (1 M), Alat Uji,Pita printer,helm,sarung tangan,kacamata,masker		
2	5	2	05	1	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	Laporan Jumlah kendaraan yang telah teregistrasi	1 Unit	111,390,000
1	0	2.	0		Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	smart cart 15000 set	1500	625,000,000
2	5	2	05	4					



1	0	2.	0	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Sosialisasi SOP 7 Uptd	Sosialisasi SOP 7 Uptd	1	Laporan	150,690,000	Dana Transfer Umu m- Dana Alokasi Umu m
2	5	2.	05	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Ramchek ke 7 Uptd,	Ramchek ke 7 Uptd,	1	Laporan	138,825,000	Dana Transfer Umu m- Dana Alokasi Umu m
2	5	2.	05	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Alat uji kalibrasi pendukung,Genset	Alat uji kalibrasi pendukung,Genset	8	Unit	276,730,000	Dana Transfer Umu m- Dana Alokasi Umu m





Rencana Kerja Tahun 2023  
Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi

				Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	PAM ( besar, Nataru, Gakum, Hari libur, KTL )	PAM ( hari			Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum
2	1	0	2.	0	4					532,821,500
2	1	0	2.	0	5					33,589,500
2	1	0	2.	0	5					34,117,000
2	1	0	2.	0	4					34,117,000
2	1	0	2.	0	8					121,003,000
2	1	0	2.	0	4					121,003,000



					Penyelenggara							si Umu m	
					Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota								
2	1	0	2.	0	<b>Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>							51,830,000	
	5	2	0	9									
					Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Ratio Kinerja Lalu Lintas Kabupaten	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota						
2	1	0	2.	0			Monev 7 Uptd( Pengecekan Jumlah kendaraan yang masih beroperasi )					51,830,000	
2	5	2	09	2									
					<b>Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>							81,741,000	
2	1	0	2.	0									
	5	2	1	0									
					Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan	Ratio Kinerja Lalu Lintas Kabupaten	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan						
2	1	0	2.	0			Sosialisasi Pembinaan Angkutan umum ( supir/pengurus koperasi )					81,741,000	
2	5	2	10	2									











		Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	Kab. Sukabumi, Cibitung, Cibitung	Pemeliharaan Dermaga Ciniti		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
1	0	2.	0				
2	5	3	13			1 Unit	176,640,000
<b>TOTAL</b>							<b>76,996,000,000</b>

### 2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan Tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.



## BAB III

### TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

#### 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi

Telaahan terhadap kebijakan nasional merupakan penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi dinas.

Yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional, yaitu reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, pengurangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasiteknologi, politik, hukum dan keamanan serta provinsi untuk Tahun rencana, terkait dengan pembangunan kabupaten.

Kebijakan provinsi yang dicermati berupa arah kebijakan dan fokus pembangunan di wilayah provinsi. Kesemuanya itu tertuang dalam RPJMD provinsi maupun yang dirumuskan dalam RKPD provinsi (rancangan awal) dan penelaahan pengaruhnya terhadap penyusunan RKPD kabupaten.

Dalam upaya mengimplementasikan kebijakan pembangunan Nasional bidang Perhubungan secara makro menempuh kebijakan strategis yang telah ditetapkan sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang di bidang Lalu lintas dan Angkutan Jalan dan Perairan (Perhubungan Laut dan ASDP) sebagai landasan operasional bagi para stakeholders Pengelolaan Perhubungan di Kabupaten Sukabumi.

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Presiden maka visi dan misi pada Kementerian Perhubungan RI dijabarkan menjadi sasaran pembangunan nasional beserta indikator sektor transportasi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Hal ini dilakukan melalui penyelarasan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten dengan arah, kebijakan umum, serta prioritas untuk bidangbidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik Kabupaten Sukabumi., sebagaimana pada tabel berikut ini.



Tabel 3.1 Sasaran dan Indikator Kinerja Kementerian Perhubungan RI

No	Sasaran	Indikator
Penguatan Konektivitas Nasional untuk Mencapai Keseimbangan Pembangunan		
1	Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem transportasi multimoda dan antarmoda untuk mengurangi backlog maupun bottleneck kapasitas prasarana transportasi dan sarana transportasi antarmoda dan antarpulau sesuai dengan sistem transportasi nasional dan cetak biru transportasi multimoda	a) Menurunnya waktu tempuh rata-rata per koridor untuk koridor utama dari 2,6 jam per 100 km menjadi 2,2 jam per 100 km pada lintas-lintas utama; b) Meningkatnya jumlah penumpang yang diangkut maskapai penerbangan nasional dengan membangun 15 bandara baru; c) Pengembangan 9 bandara untuk pelayanan kargo udara; d) Peningkatan On-time Performance Penerbangan menjadi 95%; e) Modernisasi sistem pelayanan navigasi penerbangan dan pelayaran; f) Meningkatnya kapasitas 24 pelabuhan untuk mendukung tol laut yang terdiri 5 pelabuhan hub dan 19 pelabuhan feeder; g) Pembangunan dan pengembangan 163 Pelabuhan non komersial sebagai sub feeder tol laut; h) Dwelling time pelabuhan; i) Pembangunan 50 kapal perintis dan terlayannya 193 lintas angkutan laut perintis; j) Meningkatnya jumlah barang dan penumpang yang dapat diangkut oleh kereta api melalui pembangunan jalur KA minimal sepanjang 3.258 kilometer; k) Terhubungkannya seluruh lintas penyeberangan sabuk Utara, Tengah, dan Selatan serta poros - poros penghubungnya melalui pembangunan/ pengembangan 65 pelabuhan penyeberangan dan pengadaan 50 unit kapal penyeberangan; l) Meningkatnya peran angkutan sungai dan danau melalui pembangunan dermaga sungai dan danau di 120 lokasi.
2	Meningkatnya kinerja pelayanan dan industri transportasi nasional untuk mendukung konektivitas nasional, Sistem Logistik Nasional (Sislognas) dan konektivitas global	a) Meningkatnya pangsa pasar yang diangkut armada pelayaran niaga nasional melalui penguatan regulasi hingga 20% dan memberikan kemudahan swasta dalam penyediaan armada kapal; b) Meningkatnya jumlah armada pelayaran niaga nasional yang berumur <25 tahun hingga 50% serta meningkatnya peran armada pelayaran rakyat; c) Terselenggaranya pelayanan Short Sea Shipping yang terintegrasi dengan moda lainnya; d) Meningkatnya peran serta sektor swasta dalam pembangunan transportasi melalui KPS atau investasi langsung; e) Terpisahkannya fungsi operator dan regulator serta pemberdayaan dan peningkatan daya saing BUMN transportasi; f) Meningkatnya SDM transportasi yang bersertifikat menjadi 2 kali lipat dibandingkan kondisi baseline; g) Terhubungkannya konektivitas nasional dengan konektivitas global melalui penyelenggaraan pelayanan transportasi lintas batas negara;



No	Sasaran	Indikator
		h) Termanfaatkannya hasil industri transportasi nasional.
3	Meningkatnya tingkat keselamatan dan keamanan penyelenggaraan pelayanan transportasi	a) Menurunnya angka fatalitas korban kecelakaan transportasi jalan hingga 50 persen dari kondisi baseline; b) Menurunnya rasio kecelakaan transportasi udara pada AOC 121 dan AOC 135 menjadi kurang dari 3 kejadian/1 juta flight cycle; c) Menurunnya jumlah kejadian kecelakaan transportasi laut menjadi kurang dari 50 kejadian/tahun; d) Menurunnya rasio angka kecelakaan kereta api dari 0,025 kecelakaan per 1 juta-km perjalanan kereta api; e) Tersedianya informasi dan sistem data tingkat keselamatan infrastruktur jalan nasional dan provinsi yang mutakhir setiap tahunnya.
4	Menurunnya emisi gas rumah kaca (RAN-GRK) di sektor transportasi	Menurunnya emisi gas rumah kaca (RAN-GRK) sebesar 2,982 juta ton CO <sub>2</sub> e untuk subsektor transportasi darat, 15,945 juta ton CO <sub>2</sub> e untuk subsektor transportasi udara, dan 1,127 juta ton CO <sub>2</sub> e untuk subsektor transportasi perkeretaapian hingga tahun 2020 melalui penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang ramah lingkungan dan responsif terhadap perubahan iklim/cuaca ekstrim.
5	Tersedianya layanan transportasi serta komunikasi dan informatika di perdesaan, perbatasan negara, pulau terluar, dan wilayah non komersial lainnya	a) Meningkatnya sistem jaringan dan pelayanan transportasi perdesaan; b) Terselenggaranya pelayanan transportasi perintis secara terpadu. Pembangunan Transportasi Umum Massal Perkotaan
Pembangunan Transportasi Umum Massal Perkotaan		
6	Meningkatnya pelayanan angkutan umum massal perkotaan	a) Modal share (pangsa pasar) angkutan umum perkotaan di kota megapolitan/metropolitan/besar minimal 32 %; b) Jumlah kota yang menerapkan sistem angkutan massal berbasis jalan dan/atau kereta api minimal 34 kota.
7	Meningkatkan kinerja lalu lintas jalan Perkotaan	Meningkatnya kecepatan lalu lintas jalan nasional di kota-kota metropolitan/besar menjadi minimal 20 km/jam.
8	Meningkatkan aplikasi teknologi informasi dan skema sistem manajemen transportasi Perkotaan	a) Penerapan pengaturan persimpangan dengan menggunakan teknologi informasi (ATCS) di seluruh ibukota propinsi; b) Penerapan ATCS di kota yang telah menerapkan system angkutan massal perkotaan berbasis bus (BRT) dan kota sedang/besar yang berada di jalur logistik nasional, serta Automatic Train Protection (ATP) pada jaringan kereta api perkotaan; c) Penerapan skema pembatasan lalu lintas di kota-kota besar/metropolitan.

Sesuai rumusan sasaran nasional pembangunan sektor transportasi dalam RPJMN Tahun 2015-2019 dan memperhatikan permasalahan dan capaian pembangunan tahun 2010-2014, maka sasaran pembangunan transportasi dalam Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 dijabarkan dalam 3 aspek yaitu ; (i) keselamatan dan keamanan, (ii) pelayanan transportasi, dan (iii) kapasitas transportasi sesuai tugas dan

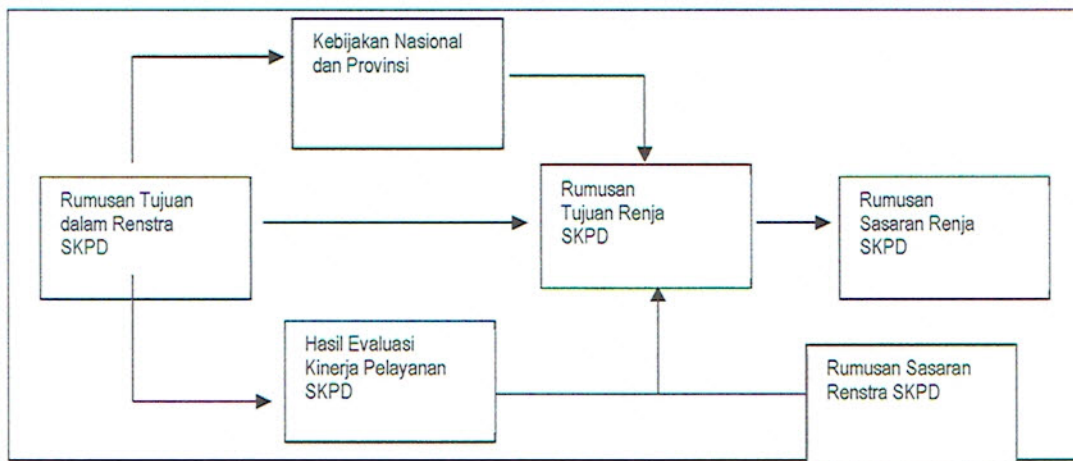
tupoksi Kementerian Perhubungan untuk mewujudkan transportasi yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah dengan uraian sebagai berikut :

- **Handal** diindikasikan oleh tersedianya layanan transportasi yang aman, selamat, nyaman, tepat waktu, terpelihara, mencukupi kebutuhan, dan secara terpadu mampu mengkoneksikan seluruh pelosok tanah air;
- **Berdaya Saing** diindikasikan oleh tersedianya layanan transportasi yang efisien, terjangkau, dan kompetitif, yang dilayani oleh penyedia jasa dan SDM yang berdaya saing internasional, profesional, mandiri, dan produktif;
- **Nilai tambah** diindikasikan oleh penyelenggaraan perhubungan yang mampu mendorong perwujudan kedaulatan, keamanan dan ketahanan nasional (*national security dan sovereignty*) di segala bidang (ideologi, politik, ekonomi, lingkungan, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan) secara berkesinambungan dan berkelanjutan (*sustainable development*).

### 3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah, mengacu pada alur pikir sebagai berikut:

Gambar 3.1





Dalam hal ini Dinas Perhubungan juga memiliki tujuan dalam membuat program dan kegiatan yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu tertentu (1 sampai dengan 5 Tahunan) yang dirumuskan sebagai berikut :

**“ Meningkatkan Pertumbuhan Infrastruktur Daerah Yang Berkualitas”**

Dengan tujuan tersebut diatas.

maka ditetapkan sasaran sebagai berikut :

**“ Meningkatkan Kinerja Layanan Transportasi ”**

Sasaran Untuk memudahkan terwujudnya program kerja dalam rangka mendukung misi bupati nomor 4 yaitu optimalisasi pelayanan kesehatan, Pendidikan dan infrastruktur Daerah. Yaitu penyediaan infrastruktur yang handal dalam perencanaan wilayah dan kota dilakukan dengan menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan seperti pemerataan pembangunan, penghematan energi, pelestarian ekologi atau lingkungan, pembangunan ekonomi yang menitikberatkan pada peningkatan performa, dan menyerap peran serta masyarakat dalam proses pembangunan secara maksimal.





Guna tercapainya tujuan dan sasaran maka diperlukan kebijakan yang pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman/pegangan/petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi.

Guna tercapainya tujuan dan sasaran maka diperlukan kebijakan yang pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman/pegangan/petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah.

Berikut disajikan **Kebijakan** Dinas Perhubungan Sukabumi Tahun 2021-2026 dalam rangka mengarahkan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

1. Peningkatan Pelayanan Dinas.
2. Peningkatan Capaian Kinerja Dinas.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas produk perencanaan Perhubungan.
4. Peningkatan kualitas infrastruktur dan fasilitas perhubungan.
5. Konsistensi penanganan kemacetan lalu lintas dan pelanggaran angkutan umum.
6. Meningkatkan pelayanan angkutan dan konektivitas wilayah.
7. Meningkatkan keselamatan perhubungan.



### 3.3 Program dan Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Program/kegiatan Perangkat Daerah adalah sekumpulan rencana kerja suatu Perangkat Daerah, dimana perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan Tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk mencegah isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam pembangunan daerah.

Perumusan program dan kegiatan pada tahap ini, merupakan penyesuaian antara identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan hasil analisis dengan arahan prioritas program dan kegiatan Perangkat Daerah menurut rancangan awal RKPD, serta mempertimbangkan hasil telaahan kebijakan nasional, dan kebijakan provinsi.

Berikut adalah daftar rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun 2023

#### 1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

*Administrasi Umum Perangkat Daerah*

1. Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor
2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
3. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*

1. Pengadaan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*



1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

## **2. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**

### *Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota*

1. Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
2. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
3. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan

### *Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C*

1. Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C
2. Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal
3. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)

### *Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor*

1. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
2. Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor
3. Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
4. Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
5. Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji
6. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
7. Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
8. Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

### *Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota*

1. Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
2. Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota
3. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota

### *Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota*

1. Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin

### *Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan*

1. Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota

### *Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota*

1. Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota

### *Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota*



1. Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota

*Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota*

1. Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota

*Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota*

1. Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

*Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota*

1. Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

### **3. PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**

*Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal*

1. Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal

*Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal*

1. Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal
2. Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal

*Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau*

1. Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau
2. Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau
3. Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau



## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah  
(RKPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 .



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikator (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan				Hasil Kegiatan	Toleransi	
2													
2 15		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2 15 01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN											
2 15 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
2 15 01 2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
2 15 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Meningkatkan Jumlah dan Kualitas Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1. Renstra, 2. Renja Murni, 3. Renja Perubahan Perangkat Daerah	Dishub			27,840,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				20,000,000	
2 15 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1. RKA Murni, 2. RKA Perubahan	Dishub			11,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				30,000,000	
2 15 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil	1. DPA Murni, 2. DPA Perubahan	Dishub	4 Dokumen		18,220,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0	





		Jumlah	1. Diklat-Teknis	Dishub			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
2 15 01 2.05 09	Pendidikan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1. Diklat-Teknis PKB, 2. Diklat Teknis PJU, 3. Diklat Teknis Lainnya				18,570,000		150,000,000
2 15 01 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>					<b>1,345,919,400</b>		<b>1,300,000,000</b>
2 15 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Meningkatkan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	1. Partisi, 2. Smart TV, 3. Sound System, 4. Meja Kursi Pejabat, 5. Server CCTV, 6. Komputer Printer 7. Scanner, 8. Laptop, 9. Lemari Sekretariat	Dishub			855,879,400		400,000,000
2 15 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1. ATK, 2. Barang Cetakan ( Cetakan Karcis, Map Dinas, Disposisi, Form SPPD, Surat Keluar, Surat Masuk Arsip) 3. Alat Kebersihan, 4. Alat Listrik	Dishub			200,950,000		300,000,000

Ko	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/	Rencana Tahun 2023			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Indikator Kinerja	Target Kinerja	Lokasi Out	Target Capaian Kinerja	Capaian Pent	Kebutuhan
		Capai	Keluaran Sub	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Capaian Pent	Kebutuhan



Uraian	Kegiatan/Sub Kegiatan	Program	Kegiatan	Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Indikator (Rp.)	Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
210205169	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dishub				289,090,000	200,000,000
21020517	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							6,561,461,980	8,600,000,000
210205172	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Meningkatkan sarana prasarana aparatur	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Dishub				6,561,461,980	3,000,000,000
21020518	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							24,411,312,000	19,600,000,000
210205182	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya jasa penunjang pemerintah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Dishub				21,012,000,000	16,000,000,000





2 1 0 5 2 2		PROGRAM-PENYELENGGARAAN-LALU-LINTAS-DAN-ANGKUTAN-JALAN-(LLA)										17,996,000,000	7,047,000,000
2 1 0 5 2 2		Penyediaan Perleengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota										12,461,984,792	4,017,000,000
2 1 0 5 2 2		Pembangunan Prasarana/Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Ratio Kinerja Lalu Lintas Kabupaten	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	PJU Tersebar di 47 Kecamatan, ZOSS 2	PJU Tersebar di 47 Kecamatan, Prioritas 18 Kecamatan, ZOSS 2	100 Unit	7,318,563,792	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	17,000,000			
2 1 0 5 2 2		Penyediaan Perleengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		Jumlah Perleengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	RPP, RAMBU, RAMBU PORTABEL di Pritaskan di Pl.ratu Untuk persiapan KKS ( Kabupaten Kota Sehat )	1100 Unit	668,588,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4,000,000,000				
2 1 0 5 2 2		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perleengkapan Jalan		Jumlah Perleengkapan Jalan yang Terpelihara	Pemeliharaan Pju,RPP,Guadril,TL(Lampu Merah)	0 Unit	4,474,833,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0				
2 1 0 5 2 3		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C										814,729,951	500,000,000



	Ratio Kinerja Lalu Lintas Kabupaten	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun	FS- (Kabandungan, caringin, gegerbitung, goalpar, sukalarang, wisata taman jaya), DED (cidahu, kadudampit, nagrak, terminal cisaat)	10 Dokumen	260,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0
210203150220031	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C						

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Target Kinerja Hasi Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Kinerja	Tolok Ukur
2150220033	Pengembangan Saranadan Prasarana Terminal		Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan	Halte (permeter), Palabuhan ratu 2 Titik (KKS), Gegerbitung 1 Titik (Smp), Kebonrandu (sd)			10 Unit		220,866,840				500,000,000
2150220033	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)		Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	Surade, Sagaranten, Parakansalak, Jubleg			0 Unit		333,863,111	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0
2150220035	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor								3,163,279,257				1,355,000,000



2	15	02	2.0	01	5	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Ratio Kinerja Lalu Lintas Kabupaten	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Bus-Keliling (1-M), Alat Uji Pita printer, helm, sarung tangan, kaca mata, masker	80 Unit	1,640,686,757	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	250,000,000
2	15	02	2.0	03	5	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor		Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Bermotor yang Terdaftar	Laporan Jumlah kendaraan yang telah teregistrasi	1 Unit	111,390,000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	80,000,000
2	15	02	2.0	04	5	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Bermotor		Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Bermotor	smart card 15000 set	15000 Doku	625,000,000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	350,000,000
2	15	02	2.0	05	5	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Bermotor		Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Bermotor	Sosialisasi SOP 7 Uptd	1 Laporan	150,690,000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	70,000,000
2	15	02	2.0	06	5	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji		Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Ramcchek ke 7 Uptd,	1 Laporan	138,825,000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	85,000,000



2	15	02	2.0	07	5	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Alat uji kalibrasi pendukung, Genset	8 Unit	276,730,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	200,000,000
2	15	02	2.0	08	5	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Perjalanan Dinas	1 Laporan	119,447,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	90,000,000
2	15	02	2.0	10	5	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Monev	1 Laporan	100,510,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	70,000,000
2	15	02	2.0	6		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				582,591,000		1,075,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2023			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Kinerja Program Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikator (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Kinerja Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp.)



		Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perencanaan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Ratio Kinerja Lalu Lintas Kabupaten	Jumlah Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perencanaan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Pemeliharaan CCTV				Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	16,180,000					300,000,000
2	15	02	2.06	02											
2	15	02	2.06	04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota			4 Laporan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	532,821,500					600,000,000
2	15	02	2.06	05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota					33,589,500					175,000,000
2	15	02	2.0	7	<b>Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota</b>					<b>34,117,000</b>					<b>0</b>
2	15	02	2.07	04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin					34,117,000					0



		Terawasi											
2	15	02	2.0	<b>Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan</b>								121,003,000	100,000,000
			8	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemyaratan Penyelenggara Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Ratio Kinerja Lalu Lintas Kabupaten	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemyaratan Penyelenggara Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Pelajar Pelopor, Pembinaan Keselamatan, Pembinaan Angkutan, Abdiyasa Teladan						
2	15	02	2.08	04									100,000,000
2	15	02	2.0	<b>Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>								51,830,000	0
			9	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Ratio Kinerja Lalu Lintas Kabupaten	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Monev 7 Uptd( Pengecekan Jumlah kendaraan yang masih beroperasi )						
2	15	02	2.09	02									0
2	15	02	2.1	<b>Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>								81,741,000	0
			0										



Rencana Kerja Tahun 2023  
Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi

2	15	02	2.10	02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Ratio Kinerja Lalu Lintas Kabupaten	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Sosialisasi Pembinaan Angkutan umum (supir/pengurus koperasi)	1 Dokumen	81,741,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	
2	15	02	2.1	2	<b>Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>								0
2	15	02	2.12	02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Ratio Kinerja Lalu Lintas Kabupaten	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Monev Kendaraan DAK 48 Desa	1 Dokumen	44,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	
2	15	02	2.1	4	<b>Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>								0

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Indikator Kinerja	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikator (Rp.)	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp.)
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Program Kegiatan	Hasil Kegiatan	Sumber Dana	Tol ok Uku	Target



2 15 02 2.14 01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Ratio Kinerja Lalu Lintas Kabupaten	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Sosialisasi Jurusan Angkutan Umum 35 Jurusan trayek	1 Laporan	312,512,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0
2 15 02 2.1 6	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					327,812,000				0
2 15 02 2.16 01	Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Ratio Kinerja Lalu Lintas Kabupaten	Jumlah Dokumen Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kajian Tarif Angkutan Umum	1 Dokumen	327,812,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0
2 15 03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN					3,000,000,000				26,900,000,000
2 15 03 2.1 0	Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpulan Lokal					312,875,000				750,000,000









## BAB V

### PENUTUP

Renja Dinas Perhubungan Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2023 dilingkup Dinas Perhubungan, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah Tahun 2023 yang tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2023. Renja Dinas Perhubungan Tahun 2023 mengacu kepada Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2021-2026, yang telah memuat hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Tahun sebelumnya, memuat permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan dalam pelaksanaan program dan kegiatan, serta telah mengakomodir usulan program dan kegiatan.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan perencanaan pembangunan statistik yang diemban oleh Dinas Perhubungan sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Sukabumi. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Renja Dinas Perhubungan.

Semoga Renja Dinas Perhubungan Tahun 2023 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2023. Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.



Sukabumi, Juli 2022  
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN,

**DEDI CARDIMAN S.IP.,M,SI**  
Pembina Utama Muda / IV c  
NIP. 19640421 198310 1 001